

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis instansi pemerintah dalam tataran operasional ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Rencana strategis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif, sistematis dan berkelanjutan yang membantu instansi untuk memusatkan semua kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Deputi Bidang potensi SAR telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut.

Rencana Strategis Deputi Bidang Potensi SAR memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Akhirnya, Rencana Strategis Deputi Bidang Potensi SAR ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja, Rencana kerja dan Anggaran serta pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Deputi Bidang potensi.

DEPUTI BIDANG POTENSI SAR



SUKARTO

MARSEKAL MUDA TNI

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG POTENSI SAR TAHUN 2010-2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pelayanan SAR dalam musibah pelayaran dan/ atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan andal merupakan kewajiban Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan organisasi internasional khususnya yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization-ICAO*) dan Organisasi Pelayaran Internasional (*International Maritime Organization-IMO*) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya musibah penerbangan, pelayaran maupun musibah lainnya, diperlukan kesiapan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue/ SAR*) baik dari segi sarana/prasarana, peralatan SAR maupun sumber daya manusia.

Tolok ukur keberhasilan pelayanan SAR terletak pada cepat tanggap terhadap terjadinya musibah, berupa upaya tindak awal untuk pencarian dan pengerahan unsur-unsur dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dimanapun musibah tersebut terjadi.

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional memuat perubahan mendasar dalam kelembagaan BASARNAS. Perubahan status Badan SAR Nasional dari tingkat eselon I di lingkungan Departemen Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan SAR Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*) yang selanjutnya disebut SAR, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BASARNAS terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Operasi SAR, Deputi Bidang Potensi SAR, Inspektorat, Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor : PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Basarnas, Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Diklat & Pemasyarakatan SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Potensi SAR.

Penyelenggaraan operasi SAR melibatkan berbagai unsur antara lain instansi pemerintah pusat dan daerah, baik sipil maupun TNI/POLRI, perusahaan penerbangan, perusahaan pelayaran, pelayaran rakyat dan unsur potensi SAR lainnya.

Peningkatan pelayanan SAR yang dituntut dari Badan SAR Nasional memerlukan suatu perencanaan yang mempunyai perspektif lebih panjang, karena berbagai masalah yang dihadapi saat ini baik yang menyangkut kelembagaan, hukum dan kewenangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, sarana/ prasarana dan peralatan, pemasyarakatan SAR kepada masyarakat, kerjasama nasional dan internasional memerlukan penanganan secara bertahap. Master Plan Badan SAR Nasional periode 2007 – 2026 telah memberikan arah kebijakan jangka panjang, dan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Potensi SAR dipandang perlu membuat Rencana Strategis (RENSTRA) Badan SAR Nasional tahun 2010 – 2014. RENSTRA Deputi Bidang Potensi SAR tahun 2010 – 2014 ini dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Badan SAR Nasional untuk kurun waktu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Badan SAR Nasional untuk menganalisis permasalahan dan potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan jangka menengah di lingkungan Badan SAR Nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan Badan SAR Nasional .

1. Kelembagaan

Dengan adanya perubahan status organisasi BASARNAS menjadi LPNK, maka organisasi BASARNAS berkembang besar. Kantor SAR yang berjumlah 24 kantor perlu pemekaran sesuai dengan pemekaran propinsi kabupaten dan kota, dan juga menyangkut eselonering beberapa kantor SAR type B dari eselon IV ke eselon III dan kemungkinan perubahan dari eselon III ke eselon II B untuk Kansar type A.

2. Sumber Daya Manusia

Dengan adanya peningkatan organisasi ke LPNK dan perubahan eselonering Kantor SAR dan pembentukan 48 Pos SAR baru serta bertambahnya sarana dan prasarana yang perlu dirawat dan dioperasikan memerlukan penambahan jumlah pegawai dari berbagai jenjang dan profesi serta masalah pembinaan karyawan dalam jabatan fungsional perlu direalisasi.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan keahlian SAR dilakukan dengan model kursus jangka pendek dan belum menerapkan system dan pola Diklat tingkat diploma. Dibutuhkan tingkat pendidikan akademis agar tenaga-tenaga SAR dapat melaksanakan tugas operasional, perawatan dan perencanaan secara lebih profesional.

Masalah yang dihadapi dalam pembinaan Sumber Daya Manusia Profesional adalah perlunya unit pelaksana teknis diklat untuk penyiapan tenaga-tenaga profesional SAR.

4. Sarana, Prasarana dan Peralatan SAR

Pada saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki BASARNAS belum memenuhi jumlah dan kualitas, sehingga sering menimbulkan kendala terutama terkait dengan kecepatan "**response time**" dalam penanganan musibah. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan peralatan SAR, adalah sebagai berikut :

a. Sarana SAR Darat

Terbatasnya jumlah Rescue Truck, Rescue Car dan belum terpenuhinya peralatan SAR serta kelengkapan peralatan operasi SAR.

b. Sarana SAR laut

Belum terpenuhinya kebutuhan kapal SAR seperti Rescue Boat, Rescue ship, Rigid Inflatable Boat, Hovercraft dan Rubber boat untuk mendukung kesiapan pelaksanaan operasi SAR di tiap wilayah baik kapasitas maupun kemampuan kapal SAR yang dimiliki Kantor-kantor SAR dibandingkan dengan luas area cakupan operasi SAR.

c. Sarana SAR udara

Kemampuan helikopter BASARNAS baru mencapai operasi dengan radius 100 NM. Mengingat dengan luas wilayah Indonesia, baik daratan maupun lautan, memerlukan penambahan Rotary Wing dengan type Medium untuk radius sampai dengan 250 NM dan pengadaan Fixed Wing type medium range dengan jangkauan sampai dengan 400 NM.

d. Prasarana SAR

Prasarana Kantor Pusat BASARNAS dan beberapa Kantor SAR serta Pos SAR belum lengkap, dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana gedung sebagai pusat eksistensi Kantor-kantor SAR dan Pos SAR.

e. Peralatan SAR

Jumlah peralatan perorangan dan beregu masih belum mencukupi.

5. Pemasyarakatan SAR Kepada Masyarakat

Dengan terjadinya bencana alam dan musibah lainnya yang makin meningkat akhir-akhir ini, peran masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya musibah dan menolong diri sendiri, keluarga dan orang lain, harus segera diberdayakan dengan memasyarakatkan pengetahuan dan keterampilan tentang SAR.

6. Anggaran Dan Biaya

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan aspek pendanaan adalah :

- a. Anggaran penyelenggaraan operasi SAR yang mengalami hambatan dikarenakan operasional pelayanan SAR diperlukan biaya pada saat kejadian.
- b. Belum sepenuhnya terpenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional pesawat/ helikopter mengakibatkan tidak semua pesawat dalam kondisi "serviceable", bahkan beberapa pesawat dalam kondisi rusak.
- c. Perlu adanya penyediaan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana SAR tindak awal seperti kapal laut, pesawat terbang, sarana SAR darat dan sistem komunikasi.
- d. Perlu adanya penyediaan dana untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan SAR baik perorangan maupun beregu bagi seluruh Kantor SAR dan Pos SAR.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagai berikut ;

1. Kekuatan

BASARNAS yang telah berpengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pencarian dan pertolongan sejak 1972 dan kini telah berkembang menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian merupakan suatu organisasi yang besar dan memiliki peran penting dalam memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi maupun bagi korban musibah lainnya.

2. Kelemahan

Sebagai lembaga LPNK BASARNAS perlu segera dikembangkan dalam berbagai aspek guna meningkatkan kinerja dari BASARNAS yang selama ini berada di bawah Departemen Perhubungan menjadi BASARNAS sebagai LPNK.

BASARNAS sebagai LPNK saat ini masih memiliki kelemahan-kelemahan antara lain dalam bidang :

a. Organisasi

Sampai saat ini Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS sebagai LPNK belum optimal ditetapkan oleh karenanya diperlukan penataan kembali struktur organisasi dan pengisian jabatan serta penetapan uraian tugas pada setiap jenjang jabatan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

b. Sumber Daya manusia.

Sebagai organisasi baru BASARNAS belum memiliki personil yang cukup sehingga masih memerlukan penambahan personil baru baik yang merupakan pemindahan dari instansi lain maupun penambahan personil baru untuk pengisian jabatan maupun untuk pengisian staff.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan operasi SAR masih diperlukan peningkatan jumlah maupun kualifikasi personil.

c. Unit pelaksana pendidikan dan pelatihan

Badan SAR Nasional belum memiliki unit pelaksana diklat sendiri yang bertugas dan berfungsi melaksanakan pendidikan dan latihan khusus SAR baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan potensi SAR dan masyarakat.

d. Sarana prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana telah banyak dilakukan pengembangan dan penambahan namun masih memerlukan penambahan-penambahan antara lain dalam hal sarana utama tindak awal, sarana deteksi dini maupun sarana-sarana dan peralatan lainnya.

Dalam hal prasarana antara lain Kantor SAR Jakarta di mana sampai saat ini belum memiliki gedung kantor sendiri dan dari sebanyak 48 Pos SAR ada juga yang belum memiliki prasarana yang dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan standard.

3. Peluang

Dengan telah ditingkatkannya lembaga BASARNAS menjadi LPNK merupakan peluang bagi BASARNAS untuk meningkatkan kinerjanya

mengingat telah memiliki kewenangan yang lebih besar dan luas dalam mengkoordinasikan Potensi SAR. Hubungan kerjasama dengan instansi terkait dan dengan Potensi SAR maupun kerjasama Internasional selama ini merupakan modal untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik.

Ditambah lagi dengan telah terbentuknya 48 Pos SAR akan dapat melayani daerah terpencil. Dengan status sebagai LPNK BASARNAS memiliki peluang untuk meningkatkan eselonering Kantor SAR, penambahan Kantor SAR maupun penambahan Pos SAR baru, sehingga jangkauan operasi dari Kantor SAR dan Pos SAR akan dapat menjangkau daerah operasional dengan lebih cepat dan dapat menjamin keselamatan pengguna jasa transportasi di seluruh nusantara.

Dengan intensifnya pelaksanaan pemasyarakatan SAR kepada masyarakat memberikan peluang kepada BASARNAS untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat yang telah memiliki pengetahuan dalam hal pencarian dan pertolongan, atas hasil dari penyuluhan, informasi, pameran dan seminar yang dilakukan.

4. Tantangan

Dengan status sebagai LPNK dan dalam rangka penyiapan SDM, sarana/prasarana dan peralatan SAR agar dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia diperlukan anggaran biaya yang cukup besar.

Perlu peningkatan anggaran DIPA BASARNAS serta perlu diciptakan system dana cadangan untuk keperluan operasi SAR.

System operasi SAR yang efektif dan efisien memerlukan sarana dan peralatan SAR yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mengingat letak geografis Indonesia yang berada pada daerah gunung berapi, lempeng kerak bumi serta adanya pengaruh pemanasan global maka musibah bencana alam diperkirakan akan terus meningkat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi dan Misi

1. Visi

Deputi Bidang Potensi SAR mempunyai visi yaitu “Terpenuhinya Fasilitas SAR yang memadai dan Sumber Daya Manusia yang profesional untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR”.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan penyiapan sarana dan prasarana SAR yang optimal;
- b. Menyelenggarakan pembinaan Sumber Daya Manusia di bidang SAR;
- c. Meningkatkan pengkoordinasian potensi SAR guna mendukung pelaksanaan operasi SAR.

3. Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan penyiapan sarana, prasarana SAR dan pembinaan sumber daya manusia yang maksimal, serta pengkoordinasian potensi SAR guna mendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR.

4. Sasaran

- a. Meningkatnya sarana, prasarana, dan peralatan SAR yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien;
- b. Meningkatnya penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan Profesionalisme SDM SAR;

- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan ketrampilan SAR;
- d. Meningkatnya jumlah SDM profesional yang cukup baik jumlah maupun kualifikasinya.

5. Program

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Potensi SAR mempunyai program utama yang akan dilaksanakan yaitu :

“Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan”

Program ini bertujuan pada pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana SAR serta pembinaan pengawakan, terselenggaranya diklat SAR, pengelolaan operasi dan Latihan SAR, dan terlaksananya pengelolaan sistem peralatan komunikasi SAR.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi Bidang Potensi SAR seperti yang dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Potensi SAR dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Badan SAR Nasional untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kebutuhan SDM profesional yang cukup, baik jumlah maupun kualifikasinya;
2. Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan SAR yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan profesionalisme SDM SAR;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR.

Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Badan SAR Nasional beserta target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Tujuan	
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2014
1.	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR maritim sesuai standar	66%
2.	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR darat sesuai standar	81%
3.	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR udara sesuai standar	30%
4.	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana urban SAR sesuai standar	60%
5.	Prosentase organisasi potensi SAR yang memiliki tenaga rescuer bersertifikasi SAR	50%
6.	Prosentase SDM BASARNAS yang telah mengikuti diklat teknis SAR sesuai dengan klasifikasinya	100%
7.	Jumlah kegiatan pembinaan potensi SAR daerah (termasuk Forum Komunikasi SAR Daerah (FKSD))	12 buah
8.	Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka pemasyarakatan SAR	12 buah
9.	Jumlah instansi dan organisasi berpotensi SAR yang dibina pertahun	26 inst/ organisasi
10.	Prosentase kecukupan pengawakan sarana utama sesuai jumlah dan kualifikasi	80%

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun 2014 tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Badan SAR Nasional ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan di bidang SAR.

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan dan merinci masing-masing tujuan beserta sasaran strategis dan indikator kerjanya.

Tujuan 1 : Mewujudkan kebutuhan SDM profesional yang cukup, baik jumlah maupun kualifikasinya

Semakin besar suatu organisasi maka semakin besar juga kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), demikian juga BASARNAS yang merupakan LPNK baru dimana masih sangat banyak membutuhkan SDM dari jumlah maupun kualifikasinya untuk menempati posisi sebagai tenaga administrasi atau tenaga lapangan (rescuer). Saat ini SDM yang tersedia belum sesuai dengan kebutuhan khususnya di Kantor SAR. Untuk itu masih banyak kebutuhan SDM yang harus dipenuhi baik jumlah maupun kualifikasinya untuk menunjang kinerja BASARNAS yang optimal.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya kebutuhan SDM profesional yang cukup, baik jumlah maupun kualifikasinya	1. Prosentase SDM BASARNAS yang memenuhi standar kebutuhan sesuai tupoksi 2. Prosentase kecukupan pengawakan sarana utama sesuai jumlah dan kualifikasi

Tujuan 2 : Meningkatkan sarana, prasarana dan peralatan SAR yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien

Untuk mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien dibutuhkan sarana dan prasarana serta peralatan SAR yang memadai. Oleh karena itu, seiring berkembangnya teknologi dan dalam rangka mencapai target keberhasilan operasi SAR dibutuhkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana maupun peralatan SAR yang sesuai standar.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
<p>Sasaran Strategis 2 :</p> <p>Meningkatnya sarana, prasarana dan peralatan SAR yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR maritim sesuai standar 2. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR darat sesuai standar 3. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR udara sesuai standar 4. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana urban SAR sesuai standar

Tujuan 3 : Meningkatkan penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan profesionalisme SDM SAR

Dengan semakin berkembangnya BASARNAS setelah menjadi LPNK maka semakin bertambah pula Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Penambahan tersebut harus diiringi dengan pembinaan yang berjenjang. Untuk itu diperlukan pendidikan dan latihan SAR yang berkelanjutan dari diklat dasar, diklat lanjutan dan diklat spesialis. Dengan semakin banyaknya penyelenggaraan diklat SAR secara berjenjang maka akan menciptakan SDM BASARNAS yang profesional.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
<p>Sasaran Strategis 3 :</p> <p>Meningkatnya penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan profesionalisme SDM SAR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase organisasi potensi SAR yang memiliki tenaga rescuer bersertifikasi SAR 2. Prosentase SDM BASARNAS yang telah mengikuti diklat teknis SAR sesuai dengan kualifikasi

Tujuan 4 : Meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR

Tugas pencarian dan pertolongan (SAR) tidak mungkin dilaksanakan oleh BASARNAS sendiri tetapi perlu adanya kerjasama dengan potensi SAR baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat. Keterlibatan potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR tidak mungkin berjalan maksimal tanpa didukung oleh pengetahuan dan keterampilan SAR yang memadai. Untuk itu diperlukan pembinaan terhadap potensi SAR secara berkala dan berkesinambungan dengan pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) atau melaksanakan pameran serta dengan mengadakan pembinaan berupa pelaksanaan diklat SAR untuk potensi SAR, sehingga partisipasi masyarakat akan berjalan secara maksimal.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi SAR daerah (termasuk Forum Komunikasi SAR Daerah (FKSD))2. Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka pemasyarakatan SAR3. Jumlah instansi dan organisasi berpotensi SAR yang dibina pertahun

BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1. Strategis dan Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJM Tahun 2010-2014 ditujukan untuk lebih memanfaatkan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian, adapun kerangka visi Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.”

Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2010-2014, dimana misi pemerintah diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014 sebagai berikut :

Misi 1 : Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera

Misi 2 : Memperkuat pilar-pilar demokrasi

Misi 3 : Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang

Mengacu pada permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggungjawab.
3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga 'hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Sebelas (11) Program aksi telah ditetapkan dalam rangka menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional, yaitu :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;

11. Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi.

Badan SAR Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), baik musibah pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya. Dalam penanganan musibah/ bencana Badan SAR Nasional juga melibatkan potensi SAR baik potensi dari Instansi Pemerintah maupun swasta.

1.2. Strategis dan Kebijakan Badan SAR Nasional

Arah kebijakan dan Strategi Badan SAR Nasional disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran Badan SAR Nasional.

Kebijakan dan Strategi :

1. Menyiapkan SDM yang cukup baik jumlah maupun kualitas, dan melakukan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta melalui jabatan fungsional.
2. Meningkatkan jumlah dan jenis pendidikan SAR, serta hasil didik dan pemberlakuan Sertifikasi SAR.
3. Penyiapan sarana utama tindak awal, prasarana, dan peralatan SAR dalam menunjang operasi SAR.
4. Menyiapkan berbagai program penyuluhan kepada masyarakat di pusat maupun di daerah.

Kebijakan dan strategi Kementerian/Lembaga dilaksanakan melalui program generik dan program teknis :

- Program generik merupakan program-program yang digunakan oleh organisasi eselon I yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

- Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal) .

Strategi dan Kebijakan Badan SAR Nasional dalam pelaksanaannya didukung dengan 2 (dua) program generik dan 1 (satu) program teknis sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR Nasional
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional.
3. Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan

Selanjutnya Program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang mewakili unit eselon II di bawahnya. Adapun penjabaran dari Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan :

- a. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR;
- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemasarakatan SAR;
- c. Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR;
- d. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi SAR.

Hasil (*Outcome*) Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan adalah ” terwujudnya pelayanan SAR yang optimal bagi masyarakat ”.

Indikator hasil (*Outcome*) Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan di Bidang Potensi adalah sebagai berikut :

- Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana SAR udara, laut, darat dan peralatan SAR;
- Jumlah awak sarana SAR;
- Jumlah tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan pemasarakatan SAR;

- Prosentase tenaga dan organisasi/instansi/lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang SAR yang tersertifikasi.

Hasil (*Output*) Kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan berdasarkan indikator sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR :

- Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana SAR udara, laut, darat dan peralatan SAR;
- Prosentase sarana dan prasarana SAR udara, laut, darat dan peralatan SAR yang dipelihara;
- Jumlah petunjuk teknis pemeliharaan sarana dan prasarana SAR udara, laut, darat dan peralatan SAR;
- Jumlah awak sarana SAR;
- Jumlah kebutuhan awak dan perbekalan dalam menunjang kegiatan SAR.

b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dan Pemasyarakatan SAR

- Jumlah alat bantu instruksi;
- Prosentase pemenuhan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan terhadap penerapan;
- Jumlah tenaga pengajar pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan SAR;
- Prosentase tenaga dan organisasi/instansi/lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang SAR yang tersertifikasi;
- Prosentase pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan tenaga SAR.

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG POTENSI SAR

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Meningkatnya sarana, prasarana dan peralatan yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan operasi SAR yang efektif dan efisien.	1. Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR maritim sesuai standar	43 %	48 %	51 %	57 %	66 %
		2. Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR darat sesuai standar	25 %	56 %	62 %	68 %	81 %
		3. Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SAR udara sesuai standar	15 %	15 %	15 %	15 %	30 %
		4. Prosentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Urban SAR sesuai standar	30 %	37 %	37 %	45 %	60 %
2	Meningkatnya penyelenggaraan diklat SAR dalam berbagai jenjang dan keahlian untuk meningkatkan profesionalisme	1. Prosentase organisasi potensi SAR yang memiliki tenaga rescuer bersertifikasi SAR	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %
		2. Prosentase SDM Basarnas yang telah mengikuti diklat teknis SAR sesuai dengan klasifikasinya	70 %	75 %	80 %	85 %	100 %
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan ketrampilan SAR	1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi SAR daerah (termasuk Forum Koordinasi SAR daerah FKSD)	4 buah	6 buah	8 buah	10 buah	12 buah
		2. Jumlah pelaksanaan pameran dalam rangka pemasyarakatan SAR	4 buah	6 buah	8 buah	10 buah	12 buah
		3. Jumlah instansi dan organisasi berpotensi SAR yang dibina pertahun	10 inst/ ORG	14 inst/ ORG	18 inst/ ORG	22 inst/ ORG	26 inst/ ORG
4.	Meningkatnya kebutuhan SDM profesional yang cukup baik jumlah maupun kualifikasinya	1. Prosentase kecukupan pengawakan sarana utama sesuai jumlah dan kualifikasi	27 %	27 %	45 %	62 %	80 %